

BAB VII

MODEL TEORETIK PERILAKU, JEJARING, PRAKTIK DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK NEPOTISME DAERAH

Penelitian ini bergerak dari penafsiran tingkat pertama (*first-order interpretation*) yang bersifat emik sebagaimana tampak dalam paparan empirik, untuk selanjutnya direkonstruksi berdasarkan pandangan etik guna membangun pemahaman tingkat kedua (*second-order interpretation*) berupa teori substantif, dan akhirnya ditransformasi menjadi teori formal sehingga tercapai penafsiran tingkat ketiga (*third-order interpretation*).

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, bab ini menyajikan: (1) ringkasan temuan substantif, (2) perumusan proposisi substantif, (3) model teoretik substantif, dan (4) model teoretik formal. Label substantif yang dimaksudkan berkenaan dengan konstruk yang melekat pada fakta empirik yang benar-benar diteliti, yaitu praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan label formal yang dimaksudkan berkenaan dengan konstruk lebih umum berupa praktik politik patronase yang mencakup tidak hanya politik nepotisme, tetapi juga politik dinasti dan politik kolusionisme, yang ditandai oleh hubungan tak setara antara kepala daerah yang masih menjabat sebagai patron, dengan calon kepala daerah yang dikehendaki dan didukung oleh patron sebagai klien, dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah.

Dikemukakan Turner (1985: 25), suatu proposisi adalah suatu pernyataan teoretik yang merinci hubungan antara dua atau lebih variabel, yang menggambarkan bagaimana keragaman dalam suatu konsep terhubung dengan keragaman konsep lain. Dengan demikian, dua unsur terpenting dalam sebuah proposisi adalah variabel-variabel dan hubungan di antara mereka.

Berkenaan dengan bentuk proposisi, Neuman (2000: 517) mengemukakan ada tiga bentuk proposisi, yaitu: (1) proposisi benar atau salah, (2) proposisi kondisional, dan (3) proposisi kausalitas. Dalam penelitian ini, ketiga bentuk proposisi tersebut digunakan sesuai dengan sifat dasar hubungan antar konsep yang dikaji, sedangkan cakupannya meliputi seluruh fokus penelitian, yaitu: (1) perilaku para aktor individual dan kolektiva dalam membangun dan menggunakan jejaring untuk praktik politik nepotisme daerah, (2) praktik politik nepotisme daerah yang dilakukan oleh para aktor individual dan kolektiva daerah, dan (3) proses dan bentuk perlawanan warga masyarakat terhadap praktik politik nepotisme daerah.

A. Ringkasan Temuan Substantif

Berdasarkan ranah tujuan tindakan aktor individu nepotis dan nepos, terdapat tiga organisasi spasial dalam jejaring politik nepotisme daerah, yaitu: organisasi spasial popularitas, organisasi spasial legalitas, dan organisasi spasial elektabilitas. Dalam ketiga organisasi spasial tersebut, aktor utamanya, yang ditandai oleh derajat sentralitasnya dalam jejaring, adalah aktor individu nepotis atau walikota yang masih

menjabat, dan selanjutnya aktor individu nepos yang tidak lain adalah isteri walikota yang masih menjabat.

Dalam organisasi spasial popularitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu Joyodroto selaku Sekretaris Kota, yang membawahi sejumlah SKPD, berupa Dinas-dinas daerah, Kantor-kantor Daerah, Badan-badan Daerah, dan lain-lain yang merupakan bagian dari aktor kolektiva perangkat daerah. Hampir semua SKPD berpotensi dimobilisasi oleh aktor individu Joyodroto untuk membantu popularitas isteri walikota yang masih menjabat sebagai aktor nepos. Kontribusi aktor individu Joyodroto sendiri tidak dapat dipisahkan dari hubungan transaksional yang berlangsung antara walikota dan isteri walikota. Ketika konstelasi politik belum banyak berubah, sebenarnya justru Joyodroto ini yang direncanakan akan mendampingi isteri walikota, untuk maju sebagai calon wakil walikota.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh aktor kolektiva NGOGO, dengan anggota paling dominan TP PKK Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, organisasi PKK telah dengan efektif bisa digunakan oleh isteri walikota untuk mempopulerkan dirinya, baik melalui berbagai program di seluruh wilayah kota, melalui kerjasama dengan aktor kolektiva perangkat daerah, maupun melalui bantuan dan kontribusi transaksional dengan aktor kolektiva media massa.

Selain sejumlah aktor tersebut, dalam ranah popularitas, isteri walikota juga sangat terbantu oleh kedudukannya sebagai bendahara DPC PDIP Kota Singapraja, yang sekaligus isteri Ketua DPC PDIP Kota Singapraja. Dengan memanfaatkan

kedudukan ini pula, aktor nepotis dan aktor nepos berhasil merekayasa keputusan semua PAC PDIP untuk menetakannya sebagai calon tunggal walikota dari DPC PDIP Kota Singapraja. Walaupun akhirnya isteri walikota ini gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, tidak diragukan lagi bahwa nama isteri walikota ini sudah sangat terkenal di kalangan anggota PDIP Kota Singapraja.

Dalam organisasi spasial legalitas, kontribusi terbesar diberikan oleh aktor individu Raden Kumara , yang berhasil mempengaruhi aktor individu Wibisono dan aktor kolektiva DPRD Partai Golkar untuk menjadi calon wakil walikota mendampingi aktor individu isteri walikota sebagai calon walikota. Ini merupakan kontribusi terbesar dalam organisasi spasial legalitas karena kursi Partai Golkar di DPRD sebanyak 5 kursi. Kontribusi terbesar kedua, diberikan oleh aktor kolektiva Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak mencalonkan anggota partainya sendiri, tetapi justru memberikan dukungan sepenuhnya kepada isteri walikota sebagai calon walikota. Sementara itu, peran KPU berlangsung sebagaimana mestinya, dengan sedikit kemudahan karena dikabarkan bahwa berkas pendaftaran pasangan calon Wara Srikandi dan Wibisono terkesan dilakukan dalam situasi serba mendesak, berupa tulisan tangan untuk nama calon wakil walikota.

Dalam organisasi spasial elektabilitas, semua aktor dalam organisasi spasial popularitas, kecuali PDIP secara organisatoris, tetap memberikan kontribusinya bagi pasangan Wara Srikandi dan Wibisono. Kontribusi terpenting, yang memberikan Wara Srikandi memiliki nilai tawar tinggi, berasal dari PAN yang memiliki 4 kursi DPRD kota. Kontribusi tambahan diberikan oleh aktor kolektiva Partai Golkar kota,

aktor kolektiva PPP, partai-partai non-parlemen, para loyalis Bagus Permadi dan Wara Srikandi, serta aktor Kresna Mukti dan secara tidak langsung aktor kolektiva Partai Golkar Kabupaten Singapanji.

Memperhatikan jejaring politik nepotisme daerah yang digunakan oleh para aktor, khususnya Bagus Permadi (walikota), Wara Srikandi (isteri walikota), Joyodroto (Sekretaris Kota), Balarama (Bendahara DPD PAN kota), Lesmono (Ketua DPD PAN kota), Raden Kumara (pengusaha berpengaruh), dan Gunawan Wibisono (Ketua DPD Partai Golkar kota), sangat tampak bahwa perilaku politik elit dalam jejaring politik nepotisme daerah ini berciri koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis.

Ada beberapa ciri perilaku politik aktor individu nepotis dan nepos bersama sejumlah aktor politik lain, baik aktor individu maupun kolektiva yang membentuk jejaring politik nepotisme daerah. Beberapa ciri perilaku politik elit yang paling menonjol adalah sifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis dari perilaku mereka. Aktor nepotis, misalnya, tidak segan-segan menggunakan kekerasan, yang bahkan menimbulkan semacam perasaan traumatik bagi para aktifis yang berupaya melakukan kritik atau perlawanan terhadapnya. Demikian juga, melalui sejumlah strategi, aktor nepotis juga berhasil membangun kekuasaan hegemonik terutama terhadap tidak hanya bagian terbesar dari perangkat daerah dan pegawai pemerintah daerah, tetapi juga sejumlah organisasi sosial yang merasa berhutang budi kepada aktor nepotis dan nepos.

Adanya aliansi temporer untuk maksud terbatas, baik yang dilakukan oleh aktor individu maupun aktor kolektiva, tanpa pernah misalnya meminta pendapat masyarakat atau konstituen partai, menunjukkan ciri lain dari perilaku elit politik daerah, yaitu: konspiratif. Pola perilaku konspiratif ini tidak saja dilakukan oleh aktor nepotis dan nepos, tetapi juga oleh aktor-aktor lain yang di antaranya adalah aktor individu yang menjadi calon wakil walikota dari aktor nepos. Aktor individu calon wakil walikota ini bahkan sama sekali meninggalkan sekelompok besar kolektiva yang telah dengan setia dan sukarela mendukungnya untuk menjadi calon walikota. Tidak ada, misalnya, upaya dari aktor calon wakil walikota untuk meminta persetujuan dulu kepada perwakilan kolektiva pendukungnya mengenai keputusannya untuk berkoalisi dengan aktor nepos. Justru, sebaliknya, aktor calon wakil walikota ini sibuk mencari rekomendasi dan dukungan dari elit politik Pusat dan kemudian elit *brokerage*, yang akhirnya memasangkannya dengan aktor nepos.

Perilaku politik elit daerah juga bersifat oligarkhis, dalam arti terjadi pemusatan kekuasaan pada sekelompok kecil elit politik atau elit yang berpengaruh di daerah. Lebih lanjut, sifat oligarkhis ini juga mewujud dalam perilaku politik nepotisme, yang bertujuan melestarikan kekuasaan pada sekelompok kecil elit politik, yang dikehendaki oleh aktor nepotis, aktor nepos, dan elit-elit daerah lainnya yang bekepentingan sama, atau bermaksud mengupayakan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui kerjasama dengan aktor nepotis.

Gejala perilaku politik elit yang koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkhis tersebut telah diikuti oleh sejumlah gejala disafeksi politik massa, berupa

perasaan subjektif berupa ketak-tertarikan, ketak-percayaan, ketak-pedulian, ketak-berdayaan, keterasingan dan sinisme masyarakat terhadap segala sesuatu yang bersifat politik, termasuk para politisi, proses politik, partai politik, dan pranata demokrasi lainnya, termasuk penyelenggara dan pengawas pemilihan kepala daerah.

Tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa disafeksi politik massa timbul karena perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah. Namun demikian, berdasarkan prinsip-prinsip penarikan kesimpulan secara induktif, patut diduga bahwa disafeksi politik massa yang dalam penelitian ini tampak bersifat sementara (*temporary*) disebabkan oleh perilaku politik elit dalam jejaring nepotisme politik daerah.

Sifat temporer dari gejala disafeksi politik massa tersebut dapat diidentifikasi terutama setelah masa jabatan aktor utama politik nepotisme daerah berakhir, sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan perlawanan, tidak hanya bersifat simbolik sebagaimana perlawanan rakyat dalam jejaring politik yang bersifat koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis, melainkan perlawanan nyata melalui penolakan untuk memilih siapa pun calon yang dikehendaki oleh aktor utama politik nepotisme daerah. Perlawanan melalui penolakan memberikan suara untuk calon kepala daerah hasil politik nepotisme ini pula yang akan dibahas lebih lanjut dan dikonsepsikan sebagai perlawanan elektoral.

Secara keseluruhan, model utuh jejaring politik nepotisme daerah dalam kaitannya dengan perilaku politik elit dan disafeksi politik massa, telah disajikan dalam bentuk gambar (Gambar 4.14). Sebagaimana tampak dalam gambar, para elit

politik daerah dipetakan pada bagian atas jejaring, sedangkan sikap dan perilaku politik massa dipetakan pada bagian bawah jejaring.

Perilaku pejabat politik nepotis dalam kasus penelitian ini juga telah meninggalkan banyak sekali jejaktraumatik khususnya pada kelompok-kelompok kritis sehingga juga mengakibatkan kelumpuhan kontrol publik. Berbagai kekerasan cenderung digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan segala bentuk konflik dan persaingan, sehingga berakumulasi dan membentuk sebuah kekuatan yang mencekam bagi kelompok-kelompok kritis. Ketika muncul keengganan dikalangan kelompok kritis untuk mengamati danmengontrol penggunaan kekuasaan,maka tidak lagi ditemukannya kontrol publik yang cukup kuat hinggamampumenghindarkan penyelewengan penggunaan kewenangan publik. Kondisi yang demikian ini berpeluang untuk diwujudkan, terutama ketika Pejabat politik nepotis berkeinginan memperpanjang jangka waktu kekuasaannya melalui praktik politik nepotisme dengan mencalonkan calon pejabat politik nepos sebagai calon walikota.

Ada tiga ranah utama tujuan politik nepotisme dalam Pemilukada, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah nepos, (2) untuk mendapatkan legalitas calon kepala daerah nepos, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah nepos .

Pertama, pejabat politik nepotis melakukan sejumlah siasat untuk meningkatkan popularitas calon pejabat politik nepos, baik melalui jalur internal partai maupun eksternal partai. Pada internal partai, upaya yang dilakukan adalah: (1) pengangkatan calon pejabat politik nepos sebagai fungsionaris partai, (2) merekayasa

susunan kepengurusan partai dengan orang-orang yang sejalan dengan kehendaknya, dan (3) merekayasa rapat-rapat partai hingga secara bulat mendukung calon pejabat politik nepos sebagai calon walikota dari partainya.

Pada eksternal partai, upaya yang dilakukan oleh Pejabat politik nepotis adalah: (1) memanfaatkan NGOGO sebagai sarana peningkatan popularitas calon pejabat politik nepos, (2) mewakili perannya dalam berbagai acara seremonial kedinasan kepada calon pejabat politik nepos, (3) menggunakan badan amal sosial sebagai sarana pengikat hubungan dengan pihak-pihak yang dia putuskan mendapatkan bantuan, (4) melakukan mutasi pejabat di instansi-instansi strategis, baik dalam arti yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat maupun yang paling memberikan kontribusi bagi pendanaan kampanye.

Kedua, kasus penelitian ini menunjukkan perjalanan panjang yang harus ditempuh baik oleh pejabat politik nepotis maupun calon pejabat politik nepos untuk mendapatkan legalitas pencalonan nepos. Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari hasil rapat partai terhadap pencalonan nepos, Pejabat politik nepotis berusaha unjuk kekuatan dukungan, baik melalui hasil survai, mengerahkan massa pada saat pendaftaran bakal cawalikota di kantor partai setempat, menekan jenjang kepengurusan partai di atasnya dengan mengajukan mosi tidak percaya bersama sejumlah pengurus partai, juga membangunkan “kantor baru” partai agar calon pejabat politik nepos mendapat rekomendasi dari pengurus pusat partai. Tetapi ternyata gagal.

Karena tidak mungkin lagi menggunakan jalur independen, pejabat politik nepotis menegosiasi partai lain agar mencalonkan calon pejabat politik nepos, dan meminta tolong "*bandar politik*" agar dicarikan pasangan dari partai lain lagi agar memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan calon kepala daerah nepos. Akhirnya, nepos yang tidak lain adalah isteri Pejabat politik nepotis bisa mendaftar sebagai calon walikota bersama calon wawali dari partai lain.

Dengan berbagai cara tersebut, memang akhirnya calon kepala daerah nepos mendapatkan legalitas untuk pencalonan dari dua partai yang memiliki jumlah kursi legislatif yang memenuhi syarat pencalonan. Memperhatikan keadaan demikian, calon kepala daerah nepos mengetahui tidak bisa lagi mengandalkan suara dari kader dan simpatisan partai yang telah memecatnya secara penuh, juga tidak bisa mengandalkan suara dari kader partai lain yang mencalonkan secara penuh. Akan halnya pasangan calon pejabat politik nepos, pada gilirannya mendapatkan penolakan justru dari para relawan dan simpatisan yang semula bergabung dalam organisasi relawan yang semula mendukungnya untuk mencalonkan sebagai Walikota, dan bukan Wakil Walikota Singapraja.

Ketiga, selain melalui pemanfaatan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemanfaatan media massa, pemanfaatan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, penggunaan sumberdaya pemerintah daerah, pembentukan tim pemenangan dan juru kampanye, dan mutasi pejabat daerah yang berada di bawah kewenangannya, pejabat politik nepotis juga mengambil alih kendali strategi pemenangan dengan meninggalkan sementara kewajibannya sebagai kepala

daerah. Semua siasat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah nepos dalam Pemiluakada.

Sejumlah siasat memang tidak dapat digolongkan sebagai bentuk praktik politik nepotisme, tetapi tetap saja dapat digolongkan sebagai siasat untuk mensukseskan seorang calon walikota hasil dari praktik politik nepotisme. Karena itu, bila sebuah bisa tindakan dinilai berdasarkan tujuan dan cara, maka meskipun cara yang dilakukan tidak melanggar norma adan etika, apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang melanggar norma dan etika, maka cara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etik.

Berbagai praktik politik nepotisme, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, maupun meningkatkan elektabilitas secara bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan munculnya: (1) stigmatisasi negatif terhadap para aktor utama politik nepotisme, (2) resistensi simbolik dan keseharian masyarakat terhadap para aktor utama politik nepotisme, (3) transaksionalisasi dukungan dan suara warga terhadap calon hasil nepotisme, dan akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih pasangan calon hasil nepotisme.

Wujud akhir dari perlawanan terhadap praktik politik nepotisme adalah penolakan untuk memberikan suara secara sukarela terhadap pasangan calon hasil nepotisme, sehingga meskipun secara permukaan tampak luar biasa dan menimbulkan optimisme untuk menang dalam satu putaran, ternyata justru kalah secara telak dalam Pemiluakada. Pergeseran dari perlawanan stigmatisasi negatif, resistensi simbolik,

transaksionalisasi dukungan menuju resistensi elektoral berlangsung seiring dengan tingkat toleransi masyarakat terhadap praktik politik nepotisme. Semakin praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat ditoleransi masyarakat, maka semakin mungkin perlawanan diberikan dalam bentuk resistensi elektoral.

B. Perumusan Proposisi Substantif

Berdasarkan seluruh temuan penelitian ini, bisa dirumuskan beberapa proposisi empirik sebagai berikut:

Proposisi 1: Perilaku aktor utama dalam jejaring politik nepotisme daerah yang menunjukkan ciri-ciri praktik kekuasaan koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkhis, mengakibatkan disafeksi politik temporer masyarakat dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme masyarakat terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah

Proposisi 2: Praktik politik nepotisme kepala daerah dimaksudkan untuk mencapai tiga ranah tujuan yang bersifat maju bertahap sejalan proses pemilihan kepala daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah nepos, (2) untuk mendapatkan legalitas popularitas calon kepala daerah nepos, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas popularitas calon kepala daerah nepos.

Proposisi 3: Ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah nepos dilakukan dengan: (1) melancarkan siasat internal partai pejabat politik nepotis dan calon pejabat politik nepos, dan (2)

melancarkan siasat eksternal partai pejabat politik nepotis dan calon kepala daerah nepos.

Proposisi 4: Ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk mendapatkan legalitas calon kepala daerah nepos dilakukan dengan melakukan persuasi dan negosiasi keputusan rekomendasi pengurus pusat partai politik dimana kepala daerah selaku nepotis dan calon kepala daerah nepos menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Proposisi 5: Bila legalitas calon kepala daerah nepos melalui rekomendasi pengurus pusat partai gagal diperoleh, maka kepala daerah nepotis dan calon kepala daerah nepos mengupayakan dengan menjalin hubungan transaksional dengan beberapa partai tertentu yang akan mencalonkan nepos, dan partai lain yang mengajukan pasangan calon bagi nepos.

Proposisi 6: Ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah nepos dilakukan oleh para aktor utama, khususnya kepala daerah sebagai nepotis, dengan sejumlah tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap sumberdaya publik dan aneka tindakan koruptif lainnya.

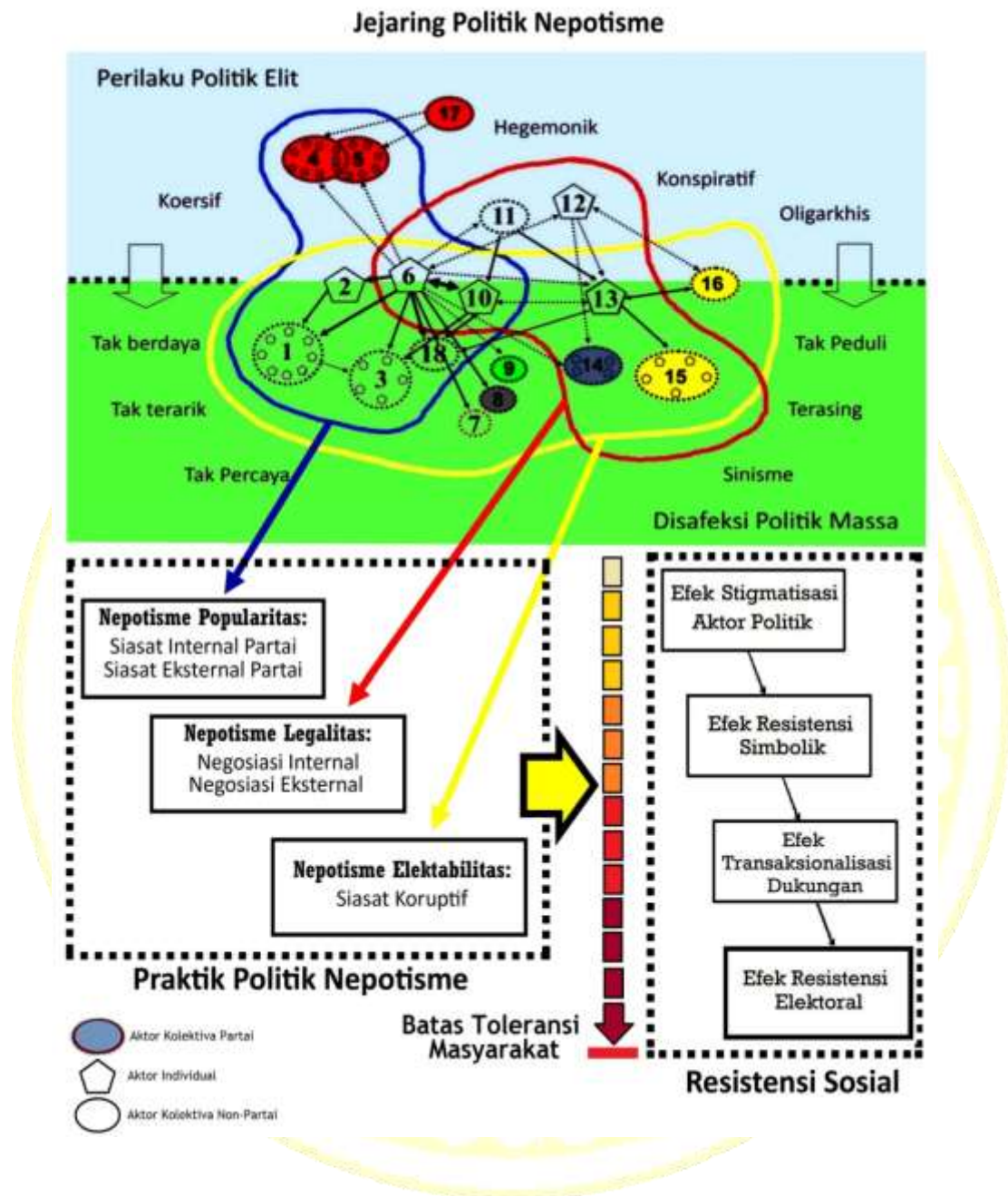
Proposisi 7: Praktik politik nepotisme daerah, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, maupun meningkatkan elektabilitas oleh para aktor utama, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan sejumlah bentuk perlawanan masyarakat yang bergeser menurut tingkat toleransi masyarakat, mulai dari: (1) berbagai stigmatisasi negatif terhadap perilaku politik nepotis dan nepos, (2) berbagai bentuk resistensi simbolik dan keseharian masyarakat, (3)

transaksionalisasi dukungan dan suara oleh warga masyarakat kepada calon kepala daerah nepos, dan akhirnya akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih calon kepala daerah nepos dalam pemilihan kepala daerah.

C. Model Teoretik Substantif

Berdasarkan seluruh temuan penelitian dan proposisi yang berhasil dirumuskan, bisa disusun sebuah model teoretik substantif (Periksa Gambar 7.1). Tampak dalam model yang menyerupai sistem sosial, perilaku aktor utama telah membentuk jejaring politik nepotisme daerah, dengan ciri-ciri praktik kekuasaan yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis, telah mengakibatkan disafeksi politik masyarakat temporer dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah.

Disafeksi politik masyarakat yang berciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah, meleluasakan para aktor utama untuk melakukan praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah yang bertujuan meningkatkan popularitas, memperoleh legalitas, dan meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah hasil nepotisme.



Gambar 7.1: Model Teoretik Substantif Jejaring Politik Nepotisme

Sebagai tindak penyalah-gunaan kekuasaan legal-formal, praktik politik nepotisme daerah senantiasa bersentuhan dengan kesadaran etika publik masyarakat. Bila praktik politik nepotisme daerah tersebut telah dianggap telah melampaui batas toleransi masyarakat, maka masyarakat politik akan melakukan perlawanan. Sifat dasar perlawanan masyarakat terhadap praktik politik nepotisme bergerak secara bertahap, mulai dari meluasnya pemberian stigma negatif terhadap pejabat politik nepotis, calon pejabat politik nepos, beserta pihak-pihak yang bekerjasama dalam praktik politik nepotisme tersebut.

Bila praktik politik nepotisme tetap berlangsung meskipun telah berkembang stigma negatif pada sebagian masyarakat, maka stigma negatif tersebut semakin meluas dan berkembang dan menjadi wacana sejumlah besar warga masyarakat sehingga menimbulkan semacam perlawanan simbolik di kalangan masyarakat. Ada begitu banyak cara warga masyarakat untuk menunjukkan perlawanan simbolik, yang tentu saja tidak dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Berbagai bentuk sindiran, cemoohan, gunjingan, plesetan, pembangkangan terselubung, dan penundaan pembalasan, bisa digolongkan sebagai senjata kaum lemah (*weapons of the weak*).

Selanjutnya, meskipun pejabat politik nepotis semula memiliki pendukung sukarela mayoritas, yang karena itu berhasil memenangkan pemilihan pejabat politik daerah dan bahkan berhasil mempertahankannya pada periode kedua, akan menghadapi kemerosotan jumlah loyalis sukarela bagi calon kepala daerah nepos. Artinya, hampir tidak ada yang "gratis" dalam upaya meningkatkan popularitas,

mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitasnya. Gejala dari merosotnya loyalis sukarela ini adalah dengan semakin menyempitnya atau semakin tereduksinya efek transaksional "penghargaan" yang diberikan oleh pejabat politik nepotis dan calon kepala daerah nepos.

Akibat lebih lanjut dari efek transaksional yang semakin menyempit semakin tampak jelas pada hari pelaksanaan pemungutan suara berupa resistensi elektoral. Ini ditandai dengan, misalnya, tidak berimbangnya antara "biaya politik" yang dikeluarkan oleh pejabat politik nepotis dan neposnya dengan perolehan dalam pemungutan suara. Pada tingkat lebih teramat pada sebuah kelurahan, misalnya, jumlah amplop berisi sejumlah uang untuk membeli suara (*vote buying*), ternyata berjumlah lebih banyak ketimbang perolehan suaranya. Artinya jelas, bahwa tidak semua warga pemilih yang menerima uang, benar-benar memilih calon kepala daerah nepos.

Akhirnya, harus tetap dicatat bahwa perkembangan dari perlawanan simbolik menjadi perlawanan elektoral sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan pemerataan informasi publik yang lancar, tingkat pengetahuan dan wawasan politik warga masyarakat, dan ketersediaan pilihan politik alternatif bagi warga masyarakat, dan tentu saja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang memenuhi kaidah jujur dan adil, serta keterjaminan untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

D. Model Teoretik Formal

Melalui penghapusan aspek-aspek substantif model teoretik formal dan ekstrapolasi konsep spesifik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah menjadi konsep lebih umum politik patronase dalam pemilihan kepala daerah, dapat disusun sebuah model teoretik formal tentang praktik politik patronase dan perlawanan masyarakat terhadap praktik politik patronase dalam pemilihan kepala daerah.

Ekstrapolasi yang pada dasarnya juga menunjuk pada peramalan kemungkinan terhadap fenomena praktik politik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah, selain berbentuk perluasan konsep spesifik menjadi konsep lebih umum, juga dilakukan dalam bentuk perhitungan terhadap kejadian paling umum yang mungkin terjadi. Dalam penelitian ini, kejadian spesifik yang tidak terlalu umum terjadi adalah pemberhentian secara tidak hormat seorang kepala daerah sebagai nepotis dan isteri kepala daerah sebagai nepos dari kepengurusan dan keanggotaan partai politik terkait. Sebaliknya, kejadian yang paling umum adalah justru baik nepotis maupun nepos justru dipertahankan sebagai pengurus dan anggota partai, sehingga baik nepotis maupun nepos tetap bisa menggunakan mesin partai untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitas.

Mempertimbangkan kemungkinan paling umum yang bisa terjadi, maka dalam bentuk tipe ideal, aktor utama praktik politik patronase dalam pemilihan kepala

daerah dihipotesiskan akan berlangsung mengikuti sejumlah proposisi sebagai berikut:

Proposisi 1: Perilaku aktor utama dalam jejaring politik patronase daerah yang menunjukkan ciri-ciri praktik kekuasaan negatif, mempengaruhi afeksi politik masyarakat yang ditandai oleh tingkat keberdayaan, ketertarikan, kepercayaan, kepedulian, kedekatan dan optimisme masyarakat terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik dan proses politik daerah.

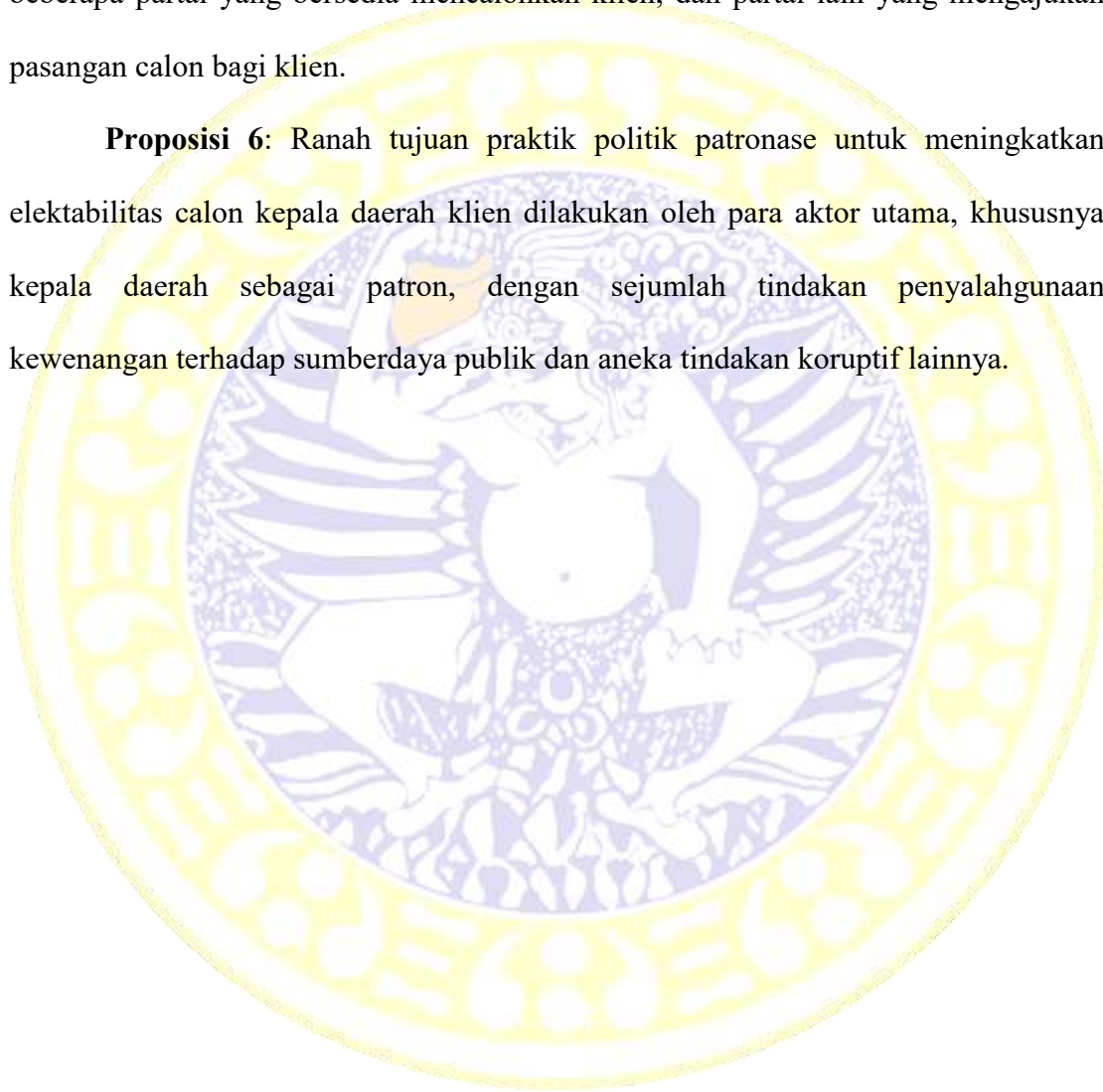
Proposisi 2: Praktik politik patronase kepala daerah selaku patron, dimaksudkan untuk mencapai tiga ranah tujuan yang bersifat maju bertahap sejalan proses pemilihan kepala daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah klien, (2) untuk mendapatkan legalitas popularitas calon kepala daerah klien, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas popularitas calon kepala daerah klien.

Proposisi 3: Ranah tujuan praktik politik patronase untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah klien dilakukan dengan: (1) melancarkan siasat internal partai patron dan calon kepala daerah klien, dan (2) melancarkan siasat eksternal partai kepala daerah patron dan calon kepala daerah klien.

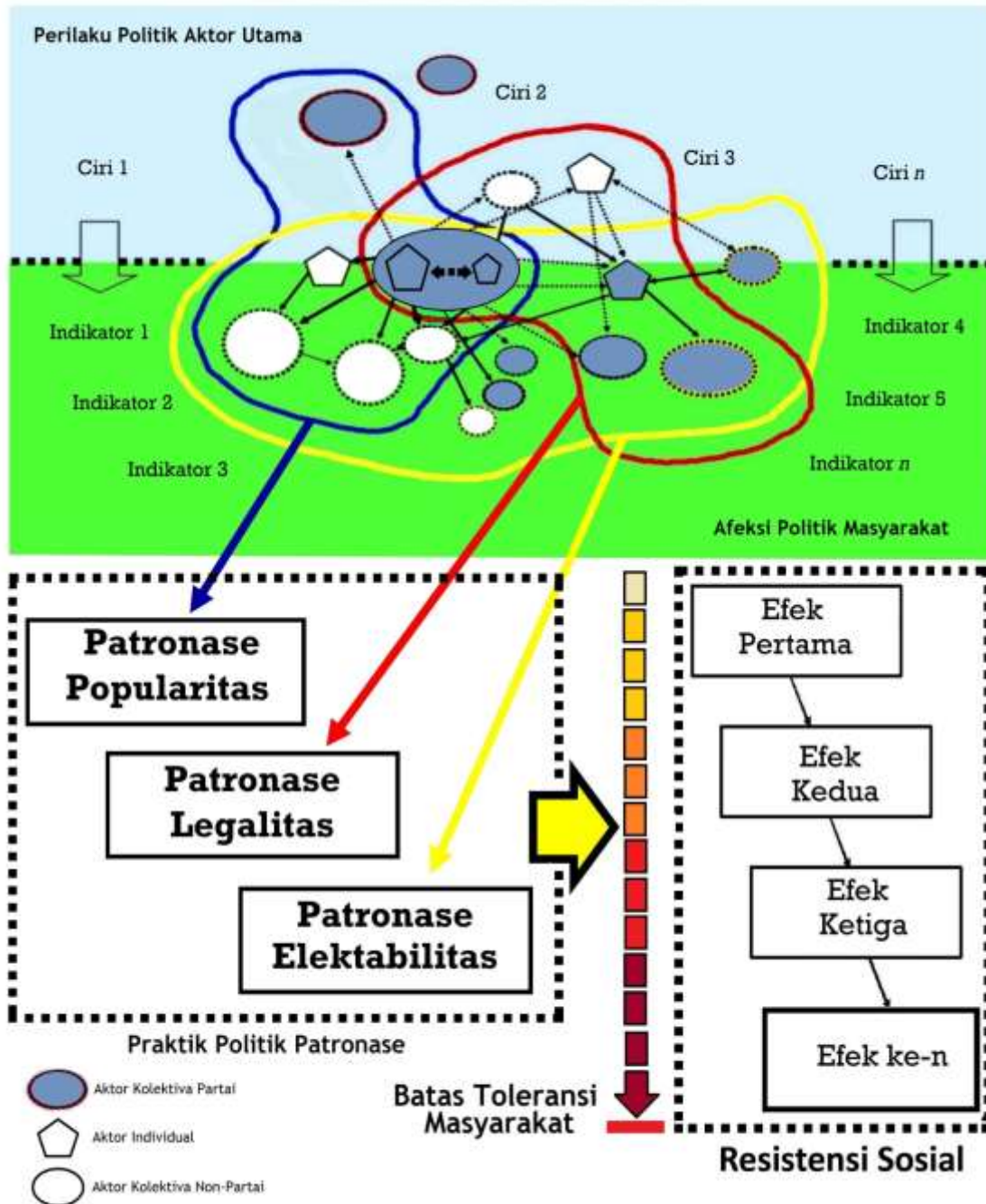
Proposisi 4: Ranah tujuan praktik politik patronase untuk mendapatkan legalitas calon kepala daerah klien dilakukan dengan melakukan persuasi dan negosiasi keputusan rekomendasi pengurus pusat partai politik dimana kepala daerah selaku patron dan calon kepala daerah klien menjadi anggota dan atau pengurus partai politik terkait.

Proposisi 5: Bila legalitas calon kepala daerah klien melalui rekomendasi pengurus pusat partai gagal diperoleh, maka kepala daerah patron dan calon kepala daerah klien mengupayakan dengan menjalin hubungan transaksional dengan beberapa partai yang bersedia mencalonkan klien, dan partai lain yang mengajukan pasangan calon bagi klien.

Proposisi 6: Ranah tujuan praktik politik patronase untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah klien dilakukan oleh para aktor utama, khususnya kepala daerah sebagai patron, dengan sejumlah tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap sumberdaya publik dan aneka tindakan koruptif lainnya.



Jejaring Politik Patronase



Gambar 7.2: Model Teoretik Formal Jejaring Politik Patronase

Proposisi 7: Praktik politik patronase daerah untuk mendapatkan popularitas, legalitas, maupun elektabilitas oleh para aktor utama, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan sejumlah bentuk perlawanan masyarakat yang bergeser menurut tingkat toleransi masyarakat, mulai dari: (1) efek pertama, seperti stigmatisasi negatif terhadap perilaku politik patron dan klien, (2) efek kedua, misalnya seperti bentuk resistensi simbolik dan keseharian masyarakat, (3) efek ketiga seperti transaksionalisasi dukungan dan suara oleh warga masyarakat kepada calon kepala daerah klien, dan akhirnya (4) efek keempat seperti resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih calon kepala daerah klien dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam rangka kajian lanjutan terhadap praktik politik patronase, baik dalam bentuk politik dinasti, politik nepotisme maupun politik kolusionisme, berdasarkan model teoretik formal ini, peneliti lanjutan bisa melakukan penelitian dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi para aktor utama baik individu maupun kolektiva dalam politik patronase pemilihan kepala daerah, (2) mengidentifikasi ciri-ciri praktik kekuasaan yang dilakukan oleh para aktor utama dalam politik patronase pemilihan kepala daerah, (3) mengidentifikasi aktor-aktor utama yang terlibat dalam ranah organisasi spasial untuk peningkatan popularitas, untuk pemerolehan legalitas, dan peningkatan popularitas calon kepala daerah sebagai klien, (4) mengidentifikasi arah hubungan serta besar pengaruh antar dari satu aktor perseorangan atau kolektiva terhadap aktor perseorangan atau kolektiva lainnya sehingga bisa dirumuskan karakteristik jejaring politik patronase kepala daerah, (5) mengidentifikasi pengaruh

praktik kekuasaan para aktor utama dalam jejaring politik patronase terhadap macam dan ciri-ciri afeksi politik masyarakat, (6) mengidentifikasi berbagai siasat yang dilakukan oleh para aktor utama dalam pemilihan kepala daerah untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah sebagai klien dari kepala daerah yang masih menjabat selaku patron, (7) mengungkap derajat toleransi masyarakat terhadap praktik politik patronase yang dilakukan oleh para aktor politik daerah, dan (8) mengidentifikasi berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik politik patronase dalam kepala daerah, baik dalam bentuk perlawanan simbolik maupun perlawanan elektoral.

Model teoretik formal tentang praktik politik patronase dan perlawanan rakyat terhadap praktik politik patronase dalam pemilihan kepala daerah tersebut, secara konseptual menyerupai teori taraf menengah (*middle-range theory*) sebagaimana digagas oleh Merton (1968) yang fungsinya dalam penelitian tidak untuk dikaji, melainkan sebagai kerangka analitik yang muatannya harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagaimana konsep fungsi, disfungsi, fungsi manifes, fungsi laten dan sebagainya, yang keberadaanya bukan untuk diuji, tetapi dimanfaatkan sebagai kerangka analitik dalam sebuah penelitian.